



Lokakarya Penulisan *Policy Brief* di Lembaga Swadaya Masyarakat Center for Strategic Development Studies (CSDS)

Policy Brief Writing Workshop at the Center for Strategic Development Studies (CSDS)

Pranoto Effendi

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Kota Depok, Indonesia

*Email: pranoto.effendi@sebi.ac.id

Article History:

Received: Maret 12, 2025;

Revised: April 18, 2025;

Accepted: April 20, 2025;

Online Available: April 20, 2025;

Published: April 20, 2025;

Keywords: Writing; Workshop;
Policy Brief

Abstract: This article aims to report and inform community service activities in the form of lectures and discussions as well as assignments and assessments in terms of writing policy briefs for researchers in the non-governmental research institution Center for Strategic Development Studies (CSDS). This article is compiled by explaining the workshop process carried out by the implementers along with the output produced. This community service activity produced outputs in the form of a draft policy brief and feedback in the form of comments and input from the implementers.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melaporkan dan menginformasikan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi serta pemberian tugas dan penilaian dalam hal penulisan *policy brief* bagi para peneliti di lingkungan lembaga penelitian swadaya masyarakat Center for Strategic Development Studies (CSDS). Artikel ini disusun dengan menjelaskan proses lokakarya yang dilakukan oleh pelaksana beserta output yang dihasilkan. Kegiatan pengabdian ini melahirkan luaran berupa draft *policy brief* dan umpan balik berupa komentar dan masukan dari pelaksana.

Kata Kunci: Penulisan; Lokakarya; Risalah Kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Policy brief, atau risalah kebijakan, adalah dokumen ringkas yang dirancang untuk dikonsumsi dan dibaca oleh pembuat kebijakan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang relevan, menawarkan solusi terhadap masalah tertentu, dan memengaruhi pengambilan keputusan. Dokumen ini biasanya ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat diakses oleh pembuat kebijakan yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis (Tawil et al., 2023).

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa risalah kebijakan itu memiliki beberapa karakteristik (Golverdi, 2021). Yang pertama dari segi kuantitas, jumlah halamannya sangat ringkas, berkisar antara dua sampai empat halaman. Lalu dari segi isi, sangat fokus pada isu tertentu yang spesifik dengan arahan pemberian rekomendasi yang jelas. Dari segi bobot, berbasis data dan hasil penelitian serta analisis yang cermat dalam mendukung argumen yang disampaikan. Yang

*Corresponding author, pranoto.effendi@sebi.ac.id

terakhir adalah risalah kebijakan itu berorientasi kepada pengguna (*user*) yaitu untuk pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan tertentu.

Dari segi struktur, risalah kebijakan secara umum terdiri dari judul dengan kata-kata yang menarik perhatian dan menggambarkan inti masalah yang akan dibahas. Lalu ada ringkasan eksekutif untuk memudahkan pembaca dan pengguna untuk memahami poin utama yang disampaikan. Selanjutnya ada bagian latar belakang yang menjadi dasar dan menggambarkan argumentasi mengapa isu yang akan disampaikan dalam risalah kebijakan tersebut sangat penting. Bagian penting berikutnya yang merupakan esensi dari risalah kebijakan adalah rekomendasi kebijakan. Ini adalah bagian yang diinginkan oleh pengguna yaitu solusi apa yang ditawarkan dengan penjelasan mengenai teknis dan konsekwensinya serta adanya data pendukung untuk lebih meyakinkan pengguna akan kelayakan rekomendasi tersebut (Rajabi, 2012).

Salah satu cara membuat risalah kebijakan adalah dengan mengambil sebuah hasil penelitian dan meringkas informasinya dan menuliskan kembali sesuai dengan struktur risalah kebijakan (Kobzar, 2013). Risalah kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dan kajian akan mempunyai kualitas yang baik dan kredibel karena adanya dasar ilmiah yang metodenya disepakati bersama di lingkungan akademisi dan peneliti (Masset et al., 2013). Namun demikian risalah kebijakan ini harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang baik sehingga maksud dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dasar teori penyusunan risalah kebijakan seperti teori komunikasi kebijakan menyatakan bahwa risalah kebijakan haruslah ringkas, jelas dan berdasarkan bukti yang ditulis dengan redaksi bahasa sederhana sehingga mudah dan langsung dipahami (Permatasari, 2020). Sementara teori advokasi kebijakan mengharuskan ada elemen urgensi dalam penyampaian risalah dan memastikan adanya keterangan akan dampak kebijakan tersebut (Tanjung, 2018). Sedangkan teori pengambilan keputusan menyatakan bahwa pembuat kebijakan biasanya tidak punya banyak waktu sehingga dengan segala keterbatasan, risalah kebijakan mestilah menyediakan informasi yang ringkas dan relevan dengan mereka (Febriansah & Meiliza, 2020). Untuk itu maka risalah kebijakan mesti disusun secara cermat menyesuaikan dengan kondisi pembaca dan pengguna risalah kebijakan (Nugrahani et al., 2024).

Manfaat dari risalah kebijakan ini adalah untuk mendiseminasikan informasi kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan secara tepat dan akurat sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan mereka (Uneke et al., 2015). Hasil-hasil kajian ilmiah terutama tidak secara mudah dapat diakses oleh pemegang otoritas dan pengambil kebijakan. Perlu ada media yang mengkomunikasikan hasil penelitian dan analisis kepada mereka dalam bentuk risalah kebijakan ini (Andhika, 2019). Risalah kebijakan ini menjadi pintu masuk bagi pengambil kebijakan untuk mendapatkan informasi yang berharga terkait rekomendasi kebijakan yang akan diambil dan dieksekusi pelaksanaannya (Prince et al., 2013).

Lembaga penelitian dalam hal ini tentu sangat berkepentingan dengan risalah kebijakan karena ini menjadi sarana agar hasil penelitian mereka dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan (Arnautu & Dagenais, 2021). Alangkah sayangnya kalau hasil penelitian yang bagus dan berkualitas tidak termanfaatkan dalam memberikan informasi kredibel dan sah serta memberikan pijakan yang kuat dalam proses pengambilan kebijakan (Mariani, 2022). Maka dari itu, lembaga penelitian perlu melakukan pelatihan dalam bentuk lokakarya dalam menulis risalah kebijakan bagi para penelitinya (Nagyova & Michie, 2023).

Center for Strategic Development Studies (CSDS) yang berinisiatif menjadi tuan rumah dalam lokakarya penulisan risalah kebijakan ini adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penelitian dan sosial terutama di aktivitas riset pembangunan, baik sektor ekonomi, industri maupun teknologi. Sudah banyak kajian yang mereka lakukan dan semua hasilnya perlu didiseminasikan kepada masyarakat dan juga pemerintah sebagai pembuat dan pengambil kebijakan.

2. METODE

Workshop dilakukan dengan ceramah dengan bahan presentasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Bahan presentasi memuat cara-cara bagaimana mengubah suatu hasil studi atau penelitian menjadi sebuah *policy brief* (Wong et al., 2017). Lalu sesi berikutnya dilakukan tanya jawab dan diskusi seputar kendala dan kiat termudah memulai membuat *policy brief* (Ndiokubwayo, 2023). Lalu sebagai penunjang, peserta workshop diberikan tugas membuat *policy brief* sesuai bidang yang diminatinya. Namun karena keterbatasan waktu akhirnya tugas tersebut dibawa ke rumah untuk diselesaikan dan diserahkan kepada instruktur di lain waktu untuk diberikan komentar dan masukan.

Pelaksanaan lokakarya sendiri berlangsung di hari Ahad, tanggal 16 Februari 2025 di

Tangerang Selatan dengan durasi pelaksanaan kurang lebih 2 jam yang dihadiri oleh para peneliti CSDS berjumlah 14 orang.

Sarana yang digunakan adalah bahan presentasi (lihat Gambar 1) berupa *file power point* dan juga template policy brief (lihat Gambar 2) berupa *file word* yang dapat digunakan untuk menyusun kerangka berpikir *policy brief* dan dikembangkan menjadi narasi dalam bentuk *policy brief* yang utuh.



Gambar 1. Bahan Presentasi *Power Point*

Latihan Menyusun Policy Brief dari Hasil Kajian

Judul Hasil Kajian

"Indonesia Energy Transition Outlook 2025: Menavigasi Transisi Energi Indonesia di Persimpangan Jalan: Momen Penting untuk Mendefinisikan Kembali Masa Depan"

Judul Tentatif Policy Brief

Bagaimana transisi energi Indonesia dapat berjalan mulus sesuai dengan kemampuan dan kapasitas tanpa menimbulkan gejolak dalam harga dan akses serta ketersediaan bagi masyarakat

User / Pembaca Policy Brief

Anggota legislatif DPR RI

Gambar 2. *File Template Latihan Menyusun Policy Brief*

3. HASIL

Bentuk luaran dari lokakarya ini adalah adanya pemahaman yang lebih lengkap dan utuh tentang risalah kebijakan dan tahapan pembuatannya. Sebanyak 14 orang peserta mengikuti lokakarya ini. Beberapa peserta memberikan pertanyaan seputar konsep dan praktek menyusun risalah kebijakan.

Sebanyak lima peserta mengerjakan tugas menyusun risalah kebijakan ketika pulang ke rumah dan menyerahkan kepada penulis untuk diberikan komentar dan masukan.

Rata-rata kualitas risalah kebijakan yang disusun sudah memadai dengan struktur yang sistematis sesuai dengan isi dan bahan yang disampaikan penulis. Masukan dari penulis antara lain soal kelengkapan data serta koherensi antara analisis dan data yang digunakan dengan kesimpulan yang diambil dan tujuan advokasi dalam risalah kebijakan.

Gambaran risalah kebijakan yang diserahkan peserta untuk diberikan komentar terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Tugas Risalah Kebijakan yang Diserahkan oleh Peserta

Peserta	Topik Risalah Kebijakan	Jumlah Halaman
1	Strategi Dekarbonisasi Maritim yang Efektif untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca	2 halaman
2	Kebijakan Distribusi Gas Elpiji 3 Kg yang Tepat Sasaran	5 halaman
3	Pengelolaan Proyek Strategis Nasional oleh Perusahaan Swasta	5 halaman
4	Strategi Kolaborasi Indonesia-Turki untuk Mewujudkan Ekosistem Industri Drone Nasional	2 halaman
5	Strategi Meningkatkan Sistem Riset dan Inovasi di Indonesia	3 halaman

Risalah kebijakan dibuat peserta bervariasi dari sisi topik dan jumlah halaman. Namun

secara umum sudah sesuai dengan struktur risalah kebijakan yaitu ringkas, lugas dan langsung ke poin utama. Variasi topiknya juga beragam dan semuanya sudah memberikan argumentasi dan rekomendasi. Jadi hasil dari lokarkarya ini dapat dikatakan berhasil dari segi tujuan yaitu membuat peserta berlatih dan mulai menulis risalah kebijakan.

4. DISKUSI

Setelah penyampaian materi, ada sesi tanya jawab. Di antara pertanyaan yang diajukan antara lain adalah bagaimana kita mengetahui bahwa risalah kebijakan yang kita buat sudah bagus. Sebenarnya para peserta adalah para peneliti yang sudah sangat terbiasa membuat penelitian dan menulis laporan sehingga kemampuan menulis mereka sudah sangat mumpuni. Namun memang perlu pengetahuan dan keterampilan tersendiri untuk menulis sebuah risalah kebijakan (DeMarco & Tufts, 2014). Untuk itu maka tidak ada cara lain kecuali mulai membuat dan berlatih secara konsisten. Salah satu tujuan lokarkarya ini adalah memberikan pengetahuan teori dan juga latihan praktik bagaimana menyusun sebuah *policy brief*.

Lalu pertanyaan berikutnya seputar kiat-kiat membuat risalah kebijakan yang baik (Likando & Kadhila, 2017). Di antara yang dapat dilakukan adalah mendapat umpan balik sebanyak-banyak dari orang lain. Apa yang kita tulis kadang-kadang jelas bagi kita tetapi ketika dibaca oleh orang lain banyak informasi yang tidak tersampaikan dan struktur kerangka risalah kebijakan yang tidak urut dan lengkap serta argumentasi yang kurang meyakinkan. Memang idealnya kita harus mempunyai pengguna (user) yang memang akan membaca dan menggunakan risalah kebijakan kita. Namun kalau situasinya terbatas kita bisa meminta teman kita untuk membaca dan memberikan masukan yang konstruktif.



Gambar 3. Kegiatan Lokakarya



Gambar 4. Penyampaian Materi dan Menjawab Pertanyaan



Gambar 5. Foto bersama Peserta setelah Lokakarya

5. KESIMPULAN

Tujuan artikel ini melaporkan workshop penulisan *policy brief* serta proses dan cara bagaimana sebuah hasil penelitian diubah menjadi sebuah *policy brief*. Dengan menggunakan teknis penulisan yang tepat, sebuah risalah kebijakan dapat dihasilkan dan dapat menjadi bahan pemikiran bagi pengambil kebijakan untuk menentukan mana pilihan-pilihan yang akan memberikan solusi permasalahan dengan disertai berbagai pertimbangan konsekwensi dari setiap pilihan. Menulis risalah kebijakan adalah bagian penting dari advokasi hasil kajian dan penelitian karena pengambil kebijakan hanya akan bisa memanfaatkan hasil penelitian kalau mereka bisa mengakses informasi yang ada melalui dokumen risalah kebijakan. Lokakarya ini merupakan langkah awal yang baik dalam belajar menyusun risalah kebijakan. Dengan ketekunan dan banyak latihan serta mendapat masukan dari orang lain akan dapat meningkatkan kualitas risalah kebijakan yang kita buat.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pak Mul yang sudah mengundang, serta Dr. Edy Marwanta dan Mas Azzam yang sudah memfasilitasi kegiatan lokakarya ini.

DAFTAR REFERENSI

- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah (Public Policy Modeling: Overview and Analysis for Government Policy Brief). *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22–35.
- Arnautu, D., & Dagenais, C. (2021). Use and effectiveness of policy briefs as a knowledge transfer tool: a scoping review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 1–14.
- DeMarco, R., & Tufts, K. A. (2014). The mechanics of writing a policy brief. *Nursing Outlook*, 62(3), 219–224.
- Febriansah, R. E., & Meiliza, D. R. (2020). Buku Ajar Teori Pengambilan Keputusan. *Umsida Press*, 1–114.
- Golverdi, M. (2021). Policy brief: A tool to influence policy making process. *Strategic Studies of Public Policy*, 11(38), 348–362.
- Kobzar, S. (2013). *Transforming research into an engaging policy story: How to write a policy brief*.
- Likando, G. N., & Kadhila, N. (2017). *The role of a policy brief in policy formulation and review: Bringing evidence to bear*.
- Mariani, S. E. (2022). Strategi Menghadapi Masa Transisi dari Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kota Tangerang). *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang*, 1(1), 86–91.
<https://jurnal.tangerangkota.go.id/new/index.php/JPKT/article/view/26/12>
- Masset, E., Gaarder, M., Beynon, P., & Chapoy, C. (2013). What is the impact of a policy brief? Results of an experiment in research dissemination. *Journal of Development Effectiveness*, 5(1), 50–63.

- Nagyova, I., & Michie, S. (2023). Writing for impact: How to create policy briefs that influence policy-making. *European Journal of Public Health*, 33(Supplement_2), ckad160-465.
- Ndihokubwayo, K. (2023). Know How to Write an Influential Policy Brief: A Systematic Guide to Writers and Readers. *Journal of Classroom Practices*, 2(2), 1–10.
- Nugrahani, C. I., Sari, A. P., Christiana, E., Amin, E. S., Rahman, T., Iszakiyah, N., Syakura, A., & Hafidah, L. (2024). Sosialisasi Policy Brief Optimalisasi Strategi Konvergensi Mewujudkan Zero Stunting di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 6(1), 446–455.
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Prince, M., Guerchet, M., & Prina, M. (2013). *Policy brief for heads of governments*. N/A Ed. London: Alzheimer's Disease International.
- Rajabi, F. (2012). Evidence-informed health policy making: the role of policy brief. *International Journal of Preventive Medicine*, 3(9), 596.
- Tanjung, S. F. (2018). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Tawil, Y. P., Alkafiah, M. K., & Satangke, M. A. (2023). Edukasi Penulisan Policy Brief dalam Upaya Peningkatan Pemahaman terkait Strategi Pengelolaan Tambang Kota Palu di Stisipol Pancha Bhakti Palu. *Jurnal Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(4), 878–882. <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/142>
- Uneke, C. J., Ezeoha, A. E., Uro-Chukwu, H., Ezeonu, C. T., Ogbu, O., Onwe, F., & Edoga, C. (2015). Enhancing the capacity of policy-makers to develop evidence-informed policy brief on infectious diseases of poverty in Nigeria. *International Journal of Health Policy and Management*, 4(9), 599.
- Wong, S. L., Green, L. A., Bazemore, A. W., & Miller, B. F. (2017). How to write a health policy brief. *Families, Systems, & Health*, 35(1), 21.